BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR: B/ 88 /KPTS/IV.01/2020

TENTANG

STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH
DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah perlu ditetapkan status penggunaan barang milik daerah oleh Bupati selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Status Penggunaan Barang Milik Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

6. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

OPD | KABAG HUKUM

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Status Penggunaan Barang Milik Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Dalam hal barang milik daerah berada pada tanah dan/atau bangunan dalam penguasaan Pengguna Barang, maka barang milik daerah tersebut dicatat dalam Daftar Barang Milik Pengguna dimana tanah dan/atau bangunan tersebut, kecuali ditentukan sebagaimana diktum kesatu.

KETIGA : Mutasi barang milik daerah antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) setelah penetapan ini, dapat dilaksanakan dengan disertai berita acara serah terima antar OPD serta dilaporkan kepada Bupati melalui Pengelola Barang.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2020, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 15 Januari 2020

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan:
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat.

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 88 /KPTS/IV.01/2020
TANGGAL : 15 JANUARI 2020

DAFTAR STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH
DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

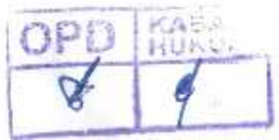
NO.	DAFTAR BARANG MILIK DAERAH	OPD	KETERANGAN
1.	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah	Sesuai dengan LBMD (KIB A, B, C, D, E, dan F) Per 31 Desember 2019 Sekretariat Daerah
2.	Sekretariat DPRD	Sekretariat DPRD	Sesuai dengan LBMD (KIB A, B, C, D, E, dan F) Per 31 Desember 2019 Sekretariat DPRD
3.	Inspektorat Kabupaten	Inspektorat Kabupaten	Sesuai dengan LBMD (KIB A, B, C, D, E, dan F) Per 31 Desember 2019 Inspektorat
4.	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	Sesuai dengan LBMD (KIB A, B, C, D, E, dan F) Per 31 Desember 2019 BPKD
5.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sesuai dengan LBMD (KIB A, B, C, D, E, dan F) Per 31 Desember 2019 Bappeda
6.	Badan Penelitian dan Pengembangan	Badan Penelitian dan Pengembangan	Sesuai dengan LBMD (KIB A, B, C, D, E, dan F) Per 31 Desember 2019 Badan Penelitian dan Pengembangan
7.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	Sesuai dengan LBMD (KIB A, B, C, D, E, dan F) Per 31 Desember 2019 Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
8.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sesuai dengan LBMD (KIB A, B, C, D, E, dan F) Per 31 Desember 2019 BPBD
9.	Kantor Kesbang dan Politik	Kantor Kesbang dan Politik	Sesuai dengan LBMD (KIB A, B, C, D, E, dan F) Per 31 Desember 2019 Kesbangpol
10.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Sesuai dengan LBMD (KIB A, B, C, D, E, dan F) Per 31 Desember 2019 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

OPD | KABAG HUKUM

11.	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	Sesuai dengan LBMD (KIB A, B, C, D, E, dan F) Per 31 Desember 2019 Dinas Kesehatan
12.	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Sesuai dengan LBMD (KIB A, B, C, D, E, dan F) Per 31 Desember 2019 Dinas PU dan PERA
13.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Sesuai dengan LBMD (KIB A, B, C, D, E, dan F) Per 31 Desember 2019 Disdukcapil
14.	Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata	Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata	Sesuai dengan LBMD (KIB A, B, C, D, E, dan F) Per 31 Desember 2019 Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata
15.	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	Sesuai dengan LBMD (KIB A, B, C, D, E, dan F) Per 31 Desember 2019 Diskoperindagsar
16.	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, PP, dan PA	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, PP, dan PA	Sesuai dengan LBMD (KIB A, B, C, D, E, dan F) Per 31 Desember 2019 Dinas Pengendalian Penduduk, KB, PP, dan PA
17.	Satuan Polisi Pamong Praja	Satuan Polisi Pamong Praja	Sesuai dengan LBMD (KIB A, B, C, D, E, dan F) Per 31 Desember 2019 Satpol PP
18.	Dinas Ketahanan Pangan	Dinas Ketahanan Pangan	Sesuai dengan LBMD (KIB A, B, C, D, E, dan F) Per 31 Desember 2019 Dinas Ketahanan Pangan
19.	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	Sesuai dengan LBMD (KIB A, B, C, D, E, dan F) Per 31 Desember 2019 Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
20.	Dinas Perkebunan dan Peternakan	Dinas Perkebunan dan Peternakan	Sesuai dengan LBMD (KIB A, B, C, D, E, dan F) Per 31 Desember 2019 Dinas Perkebunan dan Peternakan
21.	Dinas Perikanan	Dinas Perikanan	Sesuai dengan LBMD (KIB A, B, C, D, E, dan F) Per 31 Desember 2019 Dinas Perikanan
22.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon	Sesuai dengan LBMD (KIB A, B, C, D, E, dan F) Per 31 Desember 2019 Dinas PMP
23.	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	Sesuai dengan LBMD (KIB A, B, C, D, E, dan F) Per 31 Desember 2019 Dinas Lingkungan Hidup
24.	Dinas Penanaman Modal, PTSP, dan Tenaga Kerja	Dinas Penanaman Modal, PTSP, dan Tenaga Kerja	Sesuai dengan LBMD (KIB A, B, C, D, E, dan F) Per 31 Desember 2019 Dinas Penanaman Modal, PTSP, dan Tenaga Kerja



25.	Dinas Sosial	Dinas Sosial	Sesuai dengan LBMD (KIB A, B, C, D, E, dan F) Per 31 Desember 2019 Dinas Sosial
26.	Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan	Sesuai dengan LBMD (KIB A, B, C, D, E, dan F) Per 31 Desember 2019 Dishub
27.	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika	Sesuai dengan LBMD (KIB A, B, C, D, E, dan F) Per 31 Desember 2019 Diskominfo
28.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Sesuai dengan LBMD (KIB A, B, C, D, E, dan F) Per 31 Desember 2019 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
29.	RSUD Alimuddin Umar	RSUD Alimuddin Umar	Sesuai dengan LBMD (KIB A, B, C, D, E, dan F) Per 31 Desember 2019 RSUD Alimuddin Umar
30.	Kecamatan Balik Bukit	Kecamatan Balik Bukit	Sesuai dengan LBMD (KIB A, B, C, D, E, dan F) Per 31 Desember 2019 Kec Balik Bukit
31.	Kecamatan Belalau	Kecamatan Belalau	Sesuai dengan LBMD (KIB A, B, C, D, E, dan F) Per 31 Desember 2019 Kec Belalau
32.	Kecamatan Sumber Jaya	Kecamatan Sumber Jaya	Sesuai dengan LBMD (KIB A, B, C, D, E, dan F) Per 31 Desember 2019 Kec Sumber Jaya
33.	Kecamatan Way Tenong	Kecamatan Way Tenong	Sesuai dengan LBMD (KIB A, B, C, D, E, dan F) Per 31 Desember 2019 Kec Way Tenong
34.	Kecamatan Sekincau	Kecamatan Sekincau	Sesuai dengan LBMD (KIB A, B, C, D, E, dan F) Per 31 Desember 2019 Kec Sekincau
35.	Kecamatan Suoh	Kecamatan Suoh	Sesuai dengan LBMD (KIB A, B, C, D, E, dan F) Per 31 Desember 2019 Kec Suoh
36.	Kecamatan Batu Brak	Kecamatan Batu Brak	Sesuai dengan LBMD (KIB A, B, C, D, E, dan F) Per 31 Desember 2019 Kec Batu Brak
37.	Kecamatan Sukau	Kecamatan Sukau	Sesuai dengan LBMD (KIB A, B, C, D, E, dan F) Per 31 Desember 2019 Kec Sukau
38.	Kecamatan Gedung Surian	Kecamatan Gedung Surian	Sesuai dengan LBMD (KIB A, B, C, D, E, dan F) Per 31 Desember 2019 Kec Gedung Surian
39.	Kecamatan Kebun Tebu	Kecamatan Kebun Tebu	Sesuai dengan LBMD (KIB A, B, C, D, E, dan F) Per 31 Desember 2019 Kec Kebun Tebu,
40.	Kecamatan Air Hitam	Kecamatan Air Hitam	Sesuai dengan LBMD (KIB A, B, C, D, E, dan F) Per 31 Desember 2019 Kec Air Hitam



41.	Kecamatan Pagar Dewa	Kecamatan Pagar Dewa	Sesuai dengan LBMD (KIB A, B, C, D, E, dan F) Per 31 Desember 2019 Kec Pagar Dewa
42.	Kecamatan Batu Ketulis	Kecamatan Batu Ketulis	Sesuai dengan LBMD (KIB A, B, C, D, E, dan F) Per 31 Desember 2019 Kec Batu Ketulis
43.	Kecamatan Bandar Negeri Souh	Kecamatan Bandar Negeri Souh	Sesuai dengan LBMD (KIB A, B, C, D, E, dan F) Per 31 Desember 2019 Kec Bandarnegeri Souh
44.	Kecamatan Lumbok Seminung	Kecamatan Lumbok Seminung	Sesuai dengan LBMD (KIB A, B, C, D, E, dan F) Per 31 Desember 2019 Kec Lumbok Seminung

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN III	
4	BPKD	
5		
6		
7		
8		
9		

PARGOSIL MABSUS